

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: 300 Hektar Lahan Dilepas Pemprov Ke BIJB
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Majalengka
Sumber / Hal	: Radar Bandung / Hal.2
Edisi	: Kamis, 9 Agustus 2018

300 Hektar Lahan Dilepas Pemprov ke BIJB

MAJALENGKA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menyerahkan aset lahan seluas 294,8 hektar kepada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) sebagai penyertaan modal untuk pengembangan Bandara Internasio-

nal Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mewakili Pemprov Jabar menyerahkan langsung aset lahan yang berada di Desa Kertajati, Desa Bantarjati dan Desa

300Baca Hal 2

■ Sambungan dari Hal 1

Kertasari, Kabupaten Majalengka kepada PT BIJB. Hadir juga Dirut PT BIJB Virda Dimas Eka Putra dalam serah terima aset tersebut.

Iwa mengungkapkan, aset lahan 294,8 hektar senilai Rp 725 miliar yang diserahkan merupakan penyertaan modal yang diberikan Pemprov Jabar untuk pengembangan BIJB. Sebelumnya pihaknya juga telah memberikan penyertaan modal Rp 796 miliar

sehingga totalnya saat ini sebesar Rp 1,5 triliun.

"Posisi Pemprov Jabar memiliki 98,45% aset sebelum ada AP II. Mudah-mudahan dengan ada AP II yang minta 25% secara administrasi dan fisik (runway) bisa diselesaikan," katanya, di Gedung Sate, Bandung, Rabu (8/8/2018).

Iwa juga mengatakan, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar M Iriawan sedang melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan

terkait dengan kesepakatan finalisasi penyertaan modal dari AP II, sebesar 25% dari keseluruhan aset.

Menurut Iwa, dengan keterlibatan AP II, akan mempermudah rencana perpanjangan runway dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter. Bahkan secara bertahap akan kembali diperpanjang menjadi 3.500 meter sesuai masterplan.

"Harapan kita langsung saja 3.500 meter supaya bisa lebih efektif dan efisien," ka-

tanya.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk menambah penyertaan modal kepada PT BIJB supaya operasional bandara akan lebih maksimal. Sejumlah tahapan dan aturan daerahnya juga akan disiapkan.

"Kita harus susun lagi untuk mengusulkan adanya perda terkait dengan penambahan modal disektor, menjadi minimal Rp 5 triliun. Kita ada tahapan itu dulu," katanya. (ara/dtk/peh)